

## DAFTAR PUSTAKA

### A.BUKU

- Adjie, Habib, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT di Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ashofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 91.
- E.Lotulung, Paulus, 1993 *,Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah.*Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Effendi, Bachtiar, 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya* . Alumni Bandung.
- Harsono, Boedi, 1995, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, edisi revisi cetakkan ke 6jilid I. Djambatan ,Jakarta.
- Hatta, Moh ,2005,*Hukum Tanah Nasional, Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia* .Media Abadi ,Yogyakarta.
- J. Maleong,Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT.Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Marzuki ,Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo,Sudikno.1999.*Mengenal Hukum*.Liberty,Yogyakarta.
- Muljadi, Kartini , Gunawan Widjaja, 2005, *Hak-hak atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta,
- Mustofa ,2014,*Tuntunan Pembuatan Akta - akta PPAT* . Karya media, Yogyakarta.
- Parlindungan,AT .1999, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. CV.Mandar Maju.Bandung.
- Perangin,Effendi.1991.*Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*.Rajawali,Jakarta.
- Rahardjo ,Satjipto. 1983. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Alumni ,Bandung.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.

Soerodjo, Irawan. 2002. *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Indonesia*. Arloka, Surabaya.

## **B. TESIS**

Dwi Lestari, *Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT sementara) dalam peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli di kota Yogyakarta*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2014

Fitrisia Paramitha Utami, *Kajian Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pejabat Umum pembuat akta otentik dalam peralihan atas Hak*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2014

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang – Undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 perubahan Undang – Undang nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1997 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1997.

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dengan Menteri Agama Nomor 07/KMA/1985.